

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA NASABAH DAN
UNIT SIMPAN PINJAM SWAMITRA AIR TIRIS DENGAN
JAMINAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (IH)



Oleh

AAN PARLINA

10927006512

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

RIAU

2013

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA NASABAH DAN
UNIT SIMPAN PINJAM SWAMITRA AIR TIRIS DENGAN
JAMINAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB)**

SKRIPSI



OLEH

AAN PARLINA

10927006512

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

RIAU

2013

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA NASABAH DAN UNIT SIMPAN PINJAM SWAMITRA AIR TIRIS DENGAN JAMINAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis tentang sebuah pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dan Unit Simpan Pinjam Swamitra Air Tiris dengan segala kendala dan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabahnya. Sesuai dengan judulnya, lokasi penelitian penulis adalah dikantor Koperasi Swamitra Air Tiris Kecamatan Kampar. Perjanjian kredit dikoperasi Swamitra merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap nasabah yang ingin membutuhkan dana dari koperasi swamitra.

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti adalah bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dan Unit Simpan Pinjam Swamitra, apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dan Unit Simpan Pinjam Swamitra, dan bagaimana penyelesaian terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dan Unit Simpan Pinjam Swamitra, untuk mengetahui yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dan Unit Simpan Pinjam Swamitra, untuk mengetahui penyelesaian terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi. Populasi dari penelitian penulis ini adalah karyawan Swamitra Air Tiris berjumlah 7 orang, penulis mengambil sampel sebanyak 2 orang. Sedangkan nasabah yang melakukan perjanjian dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) berjumlah 40 orang, penulis mengambil sampel sebanyak 10 orang yang ditetapkan secara acak.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dan Unit Simpan Pinjam Swamitra Air Tiris dilakukan dengan mengajukan permohonan dan akan dinilai kelayakannya oleh swamitra apabila dirasa telah layak maka penandatanganan perjanjian kredit akan dilakukan dan pencairan segera dilakukan. Kendala dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Unit Simpan Pinjam Swamitra banyak sekali, baik itu kendala dalam pengalokasian dana yang diberikan maupun jaminan yang telah dijaminkan. Banyaknya kendala tersebut membuat pelaksanaan dari perjanjian tersebut tidak lancar sehingga membuat nasabah wanprestasi.

Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan Koperasi Swamitra adalah dengan cara memberikan peringatan kepada nasabah tersebut dan mengutamakan penyelesaian diluar Pengadilan dengan kata lain penyelesaian berdasarkan kekeluargaan. Maksudnya adalah dengan menyelesaikan secara bersama-sama maka akan tercapai apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Asalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur *alhamdulillah* penulis jabatkan kehadiran Allah SWT yang telah mensyari'atkan Hukum Islam kepada umat manusia, juga sebagai ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya berkat rahmat, hidayah dan nikmat yang tidak dapat dihitung yang telah diberikannya, karena penulis telah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA NASABAH DAN UNIT SIMPAN PINJAM SWAMITRA AIR TIRIS DENGAN JAMINAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB)”** tanpa ridho dan petunjuk-nya tidak mungkin skripsi ini dapat penulis selesaikan. Salawat serta salam semoga Allah SWT melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa syari'at untuk diimani, dipelajari dan dihayati, serta diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Kalau dalam skripsi ini terdapat kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun kalau skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan itu datangnya dari diri penulis sendiri, oleh karena itu penulis mohon maaf. Hal ini tidak lain adalah karena keterbatasan cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini maka penulis mohon kritik dan saran dari pembaca sangat dibutuhkan, sehingga diharapkan bisa membawa perkembangan dikemudian hari.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan baik berupa bantuan moril, spiritual, dan bantuan yang berupa materil, terutama kepada Yang Terhormat Kepada :

1. Ayahanda **Abusami** dan Ibunda **Nursiyah, A.Ma** yang selalu mencintai penulis dengan sepenuh hati dan rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan masa depan penulis dari dulu sampai sekarang.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Muhammad Nazir** sebagai Rektor UIN SUSKA RIAU beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di UIN SUSKA RIAU ini.
3. Bapak **Dr. H. Akbarizan M.Ag, M.Pd** sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum beserta **Dr. Hertina, M.Pd** selaku Pembantu Dekan I, **H. M. Kastulani, SH, MH** selaku Pembantu Dekan II, dan **Drs. H. Ahmad Darbi B, M.Ag** selaku Pembantu Dekan III. Yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu **Hj. Nurani Sahu, SH, MH** sebagai Ketua Jurusan Ilmu Hukum, sekretaris Jurusan Bapak, **H. Maqfirah, M.Ag** beserta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mencurahkan dan membagi ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Bapak **Dr. Arifuddin, MA** sebagai dosen penasehat Akademis penulis, yang memberi nasehat kepada penulis saat menjalani perkuliahan.
6. Bapak **H. Erman, MA.g** sebagai pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis selama menulis skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Pengelola Perpustakaan UIN SUSKA RIAU, terimakasih atas pinjaman bukunya sebagai referensi bagi penulis.
8. Terimakasih kepada seluruh karyawan Koperasi Swamitra terutama pimpinan Koperasi Swamitra Air Tiris **Sanzahidi, SE** yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada seluruh keluarga Abang, Kakak, Ipar dan Keponakan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Terimakasih kepada abangku Siswandi, S.Ap, sahabatku Nisfah Umayukha, Nastuti serta adek Laili Nastiti yang telah memberikan dukungan, semangat dan memberikan motivasi kepada penulis selama melakukan penelitian ini.
11. Terimakasih kepada teman-teman IH.2 dan seluruh teman-teman IH.1 IH.3, dan IH.4 angkatan 2009 yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhirul kalam syukron jazakumullah. Semoga amal baik dan sumbangsih mereka semua diterima oleh Allah SWT sebagai amal saleh.

Billahittaufik wal hidayah, Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru Agustus 2013

Penulis

Aan Parlina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGSAHAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR..... i

ABSTRAK iv

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Batasan Masalah 11

C. Rumusan Masalah 11

D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian 11

E. Metode Penelitian 12

F. Sistematika Penulisan 15

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Koperasi Swamitra 17

B. Perjanjian Kredit Dikoperasi Swamitra..... 25

BAB III TINJAUAN TEORI

A. Pengertian Koperasi Dan Perjanjian 27

B. Dasar Hukum Perjanjian Kredit 34

C. Bentuk-Bentuk Produk Pinjaman Kredit 35

D. Jaminan Pemberian Kredit 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dan Unit Simpan Pinjam Swamitra | 43 |
| B. Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dan Unit Simpan Pinjam Swamitra..... | 56 |
| C. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dan Unit Simpan Pinjam Swamitra..... | 60 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran | 68 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia memiliki beragam kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari, sehingga seringkali lupa diri saat menjalankan aktifitas dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Besarnya pendapatan sering dirasa kurang karena terjadi tumpang tindih antara kebutuhan dan keinginan dan hal ini lah yang menjadi masalah pada saat sekarang ini¹.

Kebutuhan akan hal-hal yang bersifat materil membuat manusia itu lupa, akan tetapi karena kebutuhan dari manusia itu tidak lah sedikit dan terkadang sampai melampaui batas sehingga melebihi dari yang dia miliki. Akibatnya jalan keluar yang dilakukan adalah dengan cara meminjam uang atau barang kepada orang lain. Baik itu dilakukan untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan usaha serta keperluan sekelompok orang.

Air Tiris dapat dikatakan salah satu daerah yang berkembang di Kabupaten Kampar, namun diantaranya masih ada perekonomian rakyatnya yang minim, sehingga untuk melakukan atau mengembangkan usaha dibutuhkan modal. Hal itu tidak akan dapat terwujud apabila tidak ada sarana dan prasarana yang menunjangnya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut maka perusahaan yang bergerak dibidang keuangan (lembaga keuangan) memegang peran yang sangat penting².

¹ Natara Andri & Nurbekti Satriyo, *Solusi Cerdas Mengatasi Hutang dan Kredi*, (Jakarta: Penebar plus 2008), h. 7.

² Mustafa Siregar, *Pengantar Beberapa Pengertian Hukum Perbankan*, (Medan: USU Perss 1991), h. 34.

Secara garis besar, lembaga keuangan dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu lembaga keuangan bank, lembaga bukan keuangan bank, dan lembaga pembiayaan.

1. Lembaga keuangan bank, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya. Yang termasuk lembaga keuangan bank meliputi Bank Indonesia dan Bank Pembangunan Rakyat.
2. Lembaga keuangan non bank, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.

Lembaga keuangan non bank diatur dengan Undang-Undang yang mengatur masing-masing bidang jasa keuangan non bank. Bidang usaha yang termasuk lembaga keuangan bukan bank meliputi Asuransi, Dana Pensiun, Reksadana, dan Bursa Efek.

3. Lembaga pembiayaan, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik langsung dana dari masyarakat. Yang dapat melakukan kegiatan dalam lembaga pembiayaan adalah bank, lembaga keuangan non bank dan perusahaan pembiayaan. Pasal 9 Ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 1251/KMK.013/1988 menyatakan bahwa

perusahaan pembiayaan sebagaimana disebutkan diatas harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi³.

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan atau orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan kerja sama secara kekeluargaan dan menjalankan suatu usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya⁴.

Bentuk hukum koperasi dapat menjalankan kegiatan perbankanya baik untuk bentuk bank umum, maupun bentuk Bank Perkreditan Rakyat. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 UU Perkoperasian Nomor 17 tahun 2012.

Mengenai modal koperasi Indonesia ini, didalam UU No. 17 Tahun 2012 diatur dalam ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 beserta penjelasannya. Menurut ketentuan tersebut, modal dalam koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal.

Modal kerja koperasi adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar, terutama terdiri dari kas bank, piutang dan persediaan barang-barang. Pada koperasi primer yang usahanya masih sederhana pada umumnya dana-dana lebih banyak tertanam pada modal kerja. Manajemen modal kerja harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Pada dasarnya volume modal kerja yang dibutuhkan

³ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Garafika, 2008), h. 9-13.

⁴ R.T Sutantya Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Raja Wali Perss, 2005), h. 1.

tergantung pada kecepatan berputarnya serta banyaknya pengeluaran uang setiap harinya⁵.

Dalam membantu anggotanya dan menjalankan usahanya koperasi juga membutuhkan dana, padahal ketersediaan modal yang berasal dari anggota relatif tidak mencukupi. Sehingga koperasi memerlukan bantuan guna ketersediaan dana tersebut. Banyak cara yang ditempuh untuk membantu sektor koperasi, salah satunya adalah seperti apa yang dilakukan Bank Bukopin yang bermitra dengan beberapa koperasi melalui pola swamitra. Swamitra merupakan nama dari suatu bentuk kerjasama dalam mengembangkan serta memodernisasi simpan pinjam yaitu Koperasi Swamitra Air Tiris. Melalui kerja sama antara Bank Bukopin dengan koperasi, sistem yang digunakan oleh Koperasi Swamitra sistem perbankan. Hal ini berguna untuk meningkatkan kinerja koperasi dan menambah permodalan koperasi agar dapat lebih berkembang serta membuka peluang sukses permodalan bagi koperasi yang selama ini banyak menghadapi kendala.

Perjanjian adalah satu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶ Hal itu lah yang membuat seseorang melakukan perjanjian kredit dengan jaminan yang telah disepakati antara kreditur dan debitur, dalam Pasal 1 Ayat 3 Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan dan Perbankan, telah ditentukan pengertian perjanjian kredit, perjanjian kredit adalah:

⁵ Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1991), h. 7.

⁶ Budimana N.P.D. Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Dari Prespektif Sekretaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 11-12.

“Persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai dengan bunga dan biaya-biaya yang disepakati”.

Unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit tersebut adalah:

1. Adanya persetujuan dan/atau kesepakatan;
2. Dibuat bersama antara kreditur dan debitur;
3. Adanya kewajiban debitur, adalah:
 - a. Mengembalikan kredit yang telah diterimanya;
 - b. Membayar bunga, dan
 - c. Biaya-biaya lainnya.

Menurut *Sutan Remy Sadeini* ada 3 ciri dari suatu perjanjian kredit bank yang dilakukan antara kreditur dan debitur, yaitu:

1. Bersifat Konsensual artinya adalah perjanjian kredit merupakan ciri pertama yang membedakan dari perjanjian pinjam meminjam yang bersifat riil.
2. Penggunaan kredit yang tidak dapat digunakan secara leluasa artinya kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan tertentu oleh nasabah debitur.
3. Syarat cara penggunaannya artinya hal yang membedakan perjanjian kredit bank dari perjanjian peminjaman uang adalah mengenai syarat cara penggunaannya. Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan cara menggunakan cek atau perintah pemindah bukuan. Pada peminjaman uang biasa, uang yang dipinjamkan diserahkan seluruhnya oleh

kekurangan kreditur kedalam kekuasaan debitur dengan tidak disyaratkan cara debitur akan menggunakan uang pinjaman itu⁷.

Jaminan kredit adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan, fungsi dari jaminan itu sendiri adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama⁸.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata perjanjian hanya sah apabila memenuhi syarat berupa “adanya suatu hal tertentu, sepakat para pihak, kecakapan, adanya suatu sebab yang halal”⁹.

Menurut *Salim* hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Unsur-unsur yang terkandung dalam definisi ini adalah:

1. Adanya Kaidah hukum.
2. Adanya pemberian dan penerima jaminan.
3. Adanya jaminan.
4. Adanya fasilitas kredit¹⁰.

⁷ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 78-81.

⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, , (Jakarta: Kencana, 2009), h. 73-74.

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafit, 2009), h.230.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka pada dasarnya jaminan kredit itu terbagi tiga (3) macam yaitu:

1. Jaminan perorangan (*borgtocht/personal securities/ avalist*)
2. Jaminan kebendaan yang intangible (*immateriil/ tak berwujud*)
3. Jaminan benda yang tangible (*materiil/ berwujud*)¹¹.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prinsi-prinsip hukum jaminan, pengikat jaminan, lembaga jaminan, eksekusi, dan penjualan jaminan, penanggungan utang, dan lain sebagainya sepenuhnya wajib dan harusnya dipatuhi bank dalam rangka pemberian kreditnya. Bank sebagai badan usaha yang wajib dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku agar dapat mengamankan dan melindungi kepentingannya. Jaminan kredit yang diterima bank dari debitur termasuk sebagai salah satu objek yang berkaitan dengan kepentingan bank, jaminan kredit tersebut harus dapat diyakini sebagai jaminan yang baik dan berharga sehingga akan dapat memenuhi fungsi-fungsinya, antara lain dengan memperhatikan aspek hukum yang terkait termasuk didalamnya aspek hukum jaminan.

Banyak hal mengenai jaminan kredit yang dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum jaminan. Salah satu contohnya adalah tentang penerapan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur tentang kedudukan harta seseorang yang berhutang untuk menjamin utangnya. Bank pemberi kredit

¹⁰ H. Salim, *Perkemangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.6.

¹¹ H. Rachmat Firdaus & Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 250.

hendaknya memahami dan mematuhi ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut untuk mengamankan kepentingannya sebagai pihak yang berpiutang. Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata seharusnya dipatuhi pada waktu bank melakukan penilaian calon nasabah dan ketika melakukan penanganan kredit bermasalah debitur. Pada waktu melakukan penilaian calon debitur yang mengajukan permohonan kepadanya, bank seharusnya berdasarkan kepada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dapat meyakini harta yang dimiliki oleh calon debitur untuk menajamin pelunasan kredit dikemudian hari. Harta calon debitur adalah semua hartanya yang berupa barang bergerak dan barang yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, sepenuhnya merupakan jaminan atas kredit yang bersangkutan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut, jaminan atas kredit yang diterima debitur tidak terbatas hanya pada harta debitur yang telah dikuasai bank atau yang diikat melalui sesuatu lembaga jaminan. Semua harta debitur adalah jaminan atas kredit yang diterimanya dari bank, dan dalam praktik perbankan mengenai harta debitur sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan KUH Perdata tersebut sering dicantumkan dalam ketentuan perjanjian kredit¹².

Sedangkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah menjelaskan bahwa kendaran tersebut benar miliknya serta dapat dikatakan sarana identifikasi dan berlaku sebagai pengenalan yang sah bagi kendaraan

¹²M. Bahasan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008) h.70.

bermotor yang bersangkutan dan dapat disamakan dengan sertifikat kepemilikan.

Koperasi Swamitra merupakan koperasi yang dibentuk atas kerjasama Bank Bukopin dengan koperasi, alasan koperasi ini dibentuk adalah untuk membantu masyarakat dalam memberikan pinjaman dana baik untuk melakukan usaha serta agar masyarakat tidak terjebak kedalam perangkap lintah darat yang menyengsarakan masyarakat.

Swamitra terus berupaya penuh dalam memberikan kepercayaan kepada para anggota agar mau terus tetap bergabung dengan koperasi ini, upaya yang dilakukan koperasi ini adalah dengan cara: meningkatkan kualitas SDM, dan berupaya mengatasi masalah legalitas dan kredit macet yang membuat banyak koperasi kini dicabut ijinnya.

Ketika ada anggota yang tengah membutuhkan pinjaman, koperasi ini terlebih dahulu memberikan beberapa persyaratan umum kepada anggota sebelum melakukan transaksi peminjaman, yaitu dengan menandatangani kontrak perjanjian kredit. Sejak ditandatanganinya perjanjian kredit antara kreditur dan debitur maka saat itulah akan timbul sebuah hak dan kewajiban bagi para pihak, kewajiban debitur tersebut adalah membayar pokok pinjaman beserta bunganya. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak nasabah yang tidak dapat melaksanakan prestasinya dengan baik sehingga hal itu tidak berjalan dengan yang semestinya¹³.

¹³ Sanzahidi. SE, (Menejer Swamitra Air Tiris), Wawancara , Air Tiris 22 Februari 2013.

Apabila kreditur tidak hati-hati dalam memilih atau menyeleksi calon debitur untuk meminjamkan uang tersebut maka hal itu akan beresiko bagi lembaga keuangan tersebut dan hal itu akan menimbulkan masalah dapat berakibat kredit macet.

Dalam pelaksanaannya lebih dari sebagian debitur dari total populasi yang memakai jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yaitu 23 orang yang bermasalah yang tidak melaksanakan perjanjian kredit dengan baik sehingga membuatnya melakukan wanprestasi, seperti menggunakan pinjaman tersebut tidak untuk usaha dan investasi melainkan untuk hal lain diluar dari untuk usaha dan investasi, sehingga hal tersebut membuatnya merugi dan tidak dapat mengembalikan pinjaman pokok beserta dengan bunganya. Perbuatan nasabah tersebut masuk kedalam peminjam yang bermasalah dan membuat kredit macet pada Koperasi Swamitra Air Tiris. Terkadang jaminan yang dijaminan debitur tidak dapat menutupi hutang yang akan dibayarkan oleh debitur tersebut, permasalahan tersebut menurunkan prestasi kerja Koperasi Swamitra Air Tiris¹⁴.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dan Unit Simpan Pinjam Swamitra Air Tiris Dengan Memakai Jaminan BPKB Motor”.

¹⁴ Sanzahidi. SE (Menejer Swamitra Air Tiris) wawancara, Air Tiris 15 Maret 2013.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penulis dapat mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan perjanjian kredit antaranasabah dan Swamitra dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dan Unit Simpan Pinjam Swamitra ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dan Unit Simpan Pinjam Swamitra ?
3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit antara nasabah dan Unit Simpan Pinjam Swamitra ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, maka penulis mengemukakan tujuan dari penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dan Unit Simpan Pinjam Swamitra.
- b. Untuk mengetahui yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dan unit simpan pinjam swamitra

- c. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit antara nasabah dan Unit Simpan Pinjam Swamitra .

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menyelesaikan study pada program S1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
- b. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan atau data informasi di bidang Ilmu Hukum bagi kalangan akademis untuk mengetahui dinamika masyarakat dan perkembangan hukum mengenai hukum perjanjian kredit, selain itu penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan pranata peraturan hukum dan perjanjian.
- c. Untuk menambah wawasan sebagai pedoman bagi penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan.
- d. Sebagai salah satu sumbangan penulis dalam penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang penulis lakukan di Kantor Unit Simpan Pinjam Swamitra Koperasi Republik Indonesia Guru Kecamatan Kampar (KPRI GKK) Air Tiris yang beralamatkan di Jl. Pekanbaru – Bangkinang Km 50 Pasar Air Tiris.

3. Objek dan Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah kreditur dan debitur di kantor Swamitra. Adapun objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Koperasi Swamitra Air Tiris dan nasabah Koperasi Swamitra Air Tiris, sebanyak 7 orang karyawan dan 40 orang nasabah yang memakai jaminan BPKB motor. Untuk mengetahui lebih jelas tentang populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

| No | Jenis populasi | Populasi | Sampel | Keterangan |
|----|---|----------|--------|------------|
| 1 | Pegawai Koperasi Swamitra Air Tiris | 7 | 2 | 29% |
| 2 | Nasabah yang melakukan perjanjian dengan jaminan BPKB motor | 40 | 10 | 25% |
| 3 | Jumlah | 47 | 12 | 26% |

Sumber : Data lapangan setelah diolah tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa populasi dari karyawan Swamitra Air Tiris berjumlah 7 orang, penulis mengambil sampel sebanyak 2 orang. Sedangkan nasabah yang melakukan perjanjian dengan jaminan BPKB motor berjumlah 40 orang, penulis mengambil sampel sebanyak 10 orang yang ditetapkan secara acak.

5. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan pada instansi atau lembaga yang terkait sehingga data diperoleh secara langsung dari kantor Swamitra yang menjadi objek penelitian.
- b. Data skunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian yaitu dilakukan dengan cara:

- a. Observasi, yaitu penulis langsung turun kelokasi penelitian untuk melihat langsung mengenai masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu bentuk tanya jawab secara langsung yang penulis lakukan.
- c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data atau arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti dikantor Swamitra Air Tiris. Metode dokumentasi mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.

7. Analisa Data

Data yang sudah terkumpul dianalisa dengan tehnik pendekatan kualitatif. Metode ini bersal dari data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yaitu menghubungkan suatu fakta dengan fakta yang lainnya, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

8. Metode Penulisan

Setelah data-data tersebut ditelaah untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, kemudian data tersebut disusun dengan menggunakan metode:

- a. Metode Deduktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian dianalisa dan diuraikan secara umum.
- c. Metode Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan kaedah-kaedah, subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada.

F. Sitematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis membagi pembahasan ini dalam lima bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan, merupakan bab yang berisikan uraian latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian

BAB II : Gambaran umum lokasi penelitian, merupakan uraian dan eksistensi simpan pinjam Swamitra Air Tiris, struktur kepemimpinan, visi dan misi dan lain sebagainya.

BAB III : Tinjauan teori, menjelaskan mengenai Pengertian koperasidan perjanjian kredit, Bentuk-bentuk pinjaman kredit, Jaminan kredit.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, merupakan uraian tentang Pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dan unit simpan pinjam Swamitra,Kendaladalam pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dan Unit Simpan Pinjam Swamitra,Penyelesaian terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi.

BAB V : Kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Koperasi Swamitra

1. Sejarah Koperasi Swamitra

Sebagai bank yang memiliki misi berpihak kepada koperasi dan usaha-usaha kecil, Bank Bukopin telah merintis dan mengembangkan usaha konsep kemitraan dengan koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dikenal dengan nama “Swamitra”.

Melalui kerjasama Swamitra, anggota koperasi yang bergabung sebagai anggota Swamitra dapat memperoleh akses terhadap permodalan, pengelolaan likuiditas yang efektif, transaksi keuangan yang efisien dan teknologi yang moderen. Selain itu diharapkan dapat menumbuhkan kembangkan usaha simpan pinjam dikalangan anggota koperasi guna memacu pertumbuhan usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya. Kesemuanya tersebut sangat mendukung pemberdayaan dan pertumbuhan koperasi serta usaha kecil didalam wadah Swamitra. Swamitra merupakan nama dari suatu bentuk kerjasama atau kemitraan antara Bank Bukopin dengan koperasi untuk mengembangkan serta memodenisasi usaha simpan pinjam melalui pemanfaatan jaringan teknologi dan dukungan sistem manajemen sehingga memiliki kemampuan pelayanan transaksi keuangan yang lebih luas dengan tetap memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

Pada awal berdirinya, Unit Simpan Pinjam Swamitra berada di Jakarta yang kemudian berkembang dan membuka cabang dimana-mana serta salah satunya di Air Tiris. Dengan dilakukannya sistem teknologi dan manajemen Swamitra, maka diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kepercayaan anggota masyarakat terhadap koperasi ini untuk melakukan penghimpunan dana. Swamitra didukung oleh Bank Bukopin serta dikelola oleh tenaga-tenaga koperasi yang telah dilatih secara khusus sehingga para nasabah Swamitra dapat tetap mempunyai waktu lebih banyak untuk memikirkan kemajuan usaha mereka sasaran dari swamitra adalah pedagang, petani dan perorangan yang membutuhkan modal untuk keperluan usaha yang prouktif.

Swamitra ini adalah merupakan salah satu lembaga keuangan yang dikelola oleh Koperasi Republik Indonesia Guru Kecamatan Kampar (KPRI GKK) Air Tiris dan Bank Bukopin serta pemerintah yang berorientasi kepada pembiayaan Bisnis Mikro dan pengembangan usaha kecil dan menengah atau lebih dikenal dengan UKM, dalam menjalankan usaha dan kegiatan sehari-hari Swamitra menggunakan pola dan sistem perbankan yang dibuat dan dirancang oleh Team IT Bank Bukopin.

2. Aktivitas Koperasi Swamitra

Koperasi swamitra Air Tiris beranggotakan karyawan serta masyarakat sekitarnya, koperasi ini bergerak dibidang simpan pinjam yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan usaha simpan pinjam kalangan anggota koperasi guna memacu pertumbuhan usaha dalam rangka

peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya. Selain itu, untuk membuka akses permodalan bagi anggota koperasi yang selama ini banyak menghadapi kendala.

Koperasi Air Tiris saat ini telah mempunyai Nasabah, Depositor dan Investor, Dari keseluruhan lokasi yang dibiayai oleh swamitra terdapat 345 lebih Nasabah yang telah dibiayai oleh Swamitra AirTiris dengan 5 Debitur Deposito dan 2 Investor, yang menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan-ketentuan koperasi yang berlaku serta diwajibkan membayar simpanan wajib dan simpanan pokok.

Sebagai suatu badan usaha koperasi memerlukan modal untuk menjalankan usahanya. Menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 perubahan atas Undang-Undang 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dinyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Selain modal dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi, modal koperasi juga dapat berasal dari:

- a. Hibah;
- b. Modal penyertaan;
- c. Modal pinjaman yang berasal dari:
 - a) Anggota;
 - b) Koperasi lain dan/atau Anggotanya;
 - c) Bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
 - e) Pemerintah dan pemerintah daerah dan/atau

- d. Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan setoran pokok adalah dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan. Para anggota koperasi swamitra memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- yang disebut dengan setoran pokok pada saat mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Selanjutnya anggota juga diwajibkan untuk memberikan simpanan perbulan sejumlah 20.000,- selain dari hal tersebut para anggota juga dapat menyimpan dananya dalam bentuk tabungan. Dana-dana tersebutlah yang digunakan oleh koperasi untuk membantu anggota yang sedang membutuhkan modal.

3. Struktur organisasi Swamitra Air Tiris

Karyawan Swamitra Air Tiris berjumlah 7 (tujuh) orang sebagai yaitu sebagai berikut:

| No | Jabatan | Kompetensi |
|----|-------------------------|------------------|
| 1 | Manager | S1 Ekonomi |
| 2 | Koordinator Operasional | SMEA |
| 3 | Account Officer | SMA / D. III |
| 4 | Credit Investigation | SMA / D. III |
| 5 | Teller | D. III Akuntansi |

Sumber: Data Lapangan Tahun 2013

Adapun tugas masing-masing dari karyawan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Maneger

- a. Bertugas dan bertanggung jawab kepada kepala oprasional kantor pusat Bank Bukopin.
- b. Memimpin Koperasi Swamitra bidang oprasional.
- c. Menyusun program kerja tahunan untuk pengembangan swamitra.
- d. Mengelola sumber daya manusia/karyawan yang berada dibawah kepemimpinannya.
- e. Melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi pengelolaan likuiditas koperasi swamitra.
- f. Membina hubungan yang baik dengan pihak terkait.
- g. Menyusun dan memberikan laporan secara bulanan kepada pengurus koperasi dan Bank Bukopin

2. Koordinator Operasional

- a. Bertugas bertanggung jawab langsung kepada maneger.
- b. Melakukan kontrol terhadap oprasional Koperasi Swamitra, membantu pegawai menyusun laporan serta kegiatan oprasional lainnya secara harian, mingguan, bulanan, triwulan berdasarkan tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian.
- c. Memberikan informasi dan memasukkan oprasional kepada Maneger dan Bank Bukopin.
- d. Melakukan tugas-tugas relevan lain yang di berikan oleh Maneger.

3. Account Officer

- a. Bertugas dan bertanggungjawab langsung kepada maneger operasi.

- b. Melaksanakan fungsi pemasaran, penghimpun dana menyalurkan dana masyarakat melalui simpan pinjam.
- c. Menganalisa pinjaman yang diajukan oleh anggota.
- d. Mengvaluasi dan membina nasabah agar terarah untuk mendapatkan pinjaman.
- e. Memilih atau mencapai target penyaluran dana penagihan pinjaman yang telah ditentukan sebelumnya.
- f. Bertugas dan bertanggung jawab langsung kepada manajer komersil.
- g. Melaksanakan fungsi pemasaran, penghimpun dan menyalurkan dana masyarakat melalui produk simpan pinjam.
- h. Membantu *credit support* dalam menilai agunan yang dijaminkan.
- i. Bersama *manajer komersil* dan *credit support* melakukan eksekusi jaminan apabila nasabah wanprestasi.

4. *Credit Investigation*

- a. Bertugas dan bertanggungjawab langsung pada Manajer.
- b. Menganalisa dan memberikan laporan dari aspek yuridis mengenai subjek dan obyek hukum calon nasabah.
- c. Melakukan penilaian terhadap jaminan/agunan yang di berikan oleh calon nasabah dan membuat memo penilaiannya.
- d. Mendokumentasikan pinjaman (*filling*) mulai dari permohonan pinjaman sampai dengan pelunasan pinjaman.
- e. Melakukan penyimpanan agunan yang dijaminkan nasabah.
- f. Mempersiapkan akad atau perjanjian pinjaman dan jaminan dengan calon nasabah baik secara dibawah tangan maupun secara notarial, setelah mendapat persetujuan dari kredit komite.

- g. Mempersiapkan dokumen pendorpingan pinjaman.
- h. Mendukung pembinaan kredit dalam melakukan proses peminjaman.
- i. Melakukan tugas-tugas relevan lain yang diberikan oleh maneger.
- j. Membina hubungan baik dengan pihak terkait.
- k. Menyusun dan memberikan laporan secara bulanan kepada pengurus koperasi dan Bank Bukopin.

5. *Teller*

- a. Bertugas dan bertanggungjawab langsung kepada maneger .
- b. Memberikan pelayanan penarikan dan setoran simpanan.
- c. Melakukan administrasi dan pembukuan simpan pinjam, sampai dengan neraca dan laba/rugi
- d. Melakukan pencairan atau pendropingan terhadap pinjaman yang telah disetujui.
- e. Melakukan informasi yang berkaitan dengan Koperasi Swamitra.
- f. Melakuakan administarasi dan memonitiring surat menyurat interen dan eksteren Koperasi Swamitra.
- g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh maneger operasi¹.

4. Visi dan misi koperasi Swamitra Air Tiris

a. Visi

Menjadikan Swamitra Air Tiris sebagai lembaga keuangan mikro terbaik se-Kabupaten Kampar dan Swamitra terunggul se-Provinsi Riau.

¹ Dokumentasi koperasi Swamitra Air Tiris.

b. Misi

- 1) Mewujudkan Lembaga Swamitra sebagai sebuah lembaga yang mampu menjadi lembaga keuangan mikro yang mampu menguasai pasar secara menyeluruh.
- 2) Menguasai setiap peluang dan celah yang ada untuk dimasuki dan mampu memberikan perkembangan dan kemajuan bagi Swamitra dimata masyarakat.
- 3) Menciptakan mitra-mitra yang inovatif melalui pemberian permodalan bagi wirausahawan dan pengusaha kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Kampar.
- 4) Membuktikan bahwa sesungguhnya Swamitra adalah sebuah lembaga keuangan mikro yang mampu menjadi barometer bagi lembaga keuangan lainnya².

5. Tujuan

- a. Tercapainya tujuan dan sasaran yang direncanakan pada setiap daerah yang potensial dan dapat digarap minimal 25% dari pasar konsumen yang ada.
- b. Membangun unit-unit kantor kas yang baru pada setiap kecamatan yang berada dibawah kawasan Swamitra AirTiris (minimal 1 unit kantor kas setiap tahunnya).

² Dokumentasi koperasi Swamitra Air Tiris

- c. Meningkatnya jumlah laba dan SHU yang didapat setiap tahunnya minimal terjadi peningkatan keuntungan yang didapat sebesar 35% pertahun pada tiap unit yang dibuka.
- d. Meningkatnya kesejahteraan karyawan dan pimpinan.
- e. Tersusunnya dan terstrukturnya lebih efektif program tahunan dan bulanan Swamitra.
- f. Terpublikasinya Swamitra secara menyeluruh baik melalui perorangan dan juga melalui media massa maupun media elektronik.
- g. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyaluran kredit kepada setiap nasabah dari waktu-kewaktu
- h. Terjalinnya mitra dan kerjasama yang baik antara Swamitra dengan lembaga-lembaga yang menjadi mitra binaan Swamitra³.

B. Perjanjian Kredit di Koperasi Swamitra

Apabila seseorang ingin mendapatkan pinjaman dari Koperasi Swamitra tentunya calon nasabah tersebut harus bergabung dulu sebagai anggota, sehingga setelah itu nasabah dapat meminjam sesuai dengan kebutuhannya dan juga sesuai dengan kapasitas agunan atau jaminanya dan tentunya dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh koperasi tersebut sebelumnya, yaitu:

1. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pinjaman
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri 3 rangkap
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Akte Nikah sebanyak 3 rangkap

³ Dokumentasi Koperasi Swamitra Air Tiris.

4. Foto copy surat izin usaha
5. Foto copy dokumen, bukti kepemilikan yang dijadikan jaminan 3 rangkap
6. Melampirkan bukti-bukti pendukung lainnya berupa faktur jual beli 3 bulan terakhir.
7. Fas foto 3x4
8. Bahan dimasukan kedalam map tulang.

Untuk jenis jaminan yang dapat digunakan pada Koperasi Swamitra ini adalah: surat-surat tanah (sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, akta camat), kendraan (mobil, sepeda motor), serta barang berharga lainnya.

Yang menjadi sasaran Swamitra tersebut adalah:

- a. Pedagang baik yang memiliki kios dan toko ataupun kaki lima di sekitar Pasar AirTiris
- b. Usaha jasa yang ada disekitar AirTiris, Rumbio, Kampar, Danau Bingkuang, dan sebahagian Bangkinang
- c. Industri yang berlokasi dalam kawasan Swamitra AirTiris
- d. Petani Karet yang ada dalam kawasan Swamitra AirTiris
- e. Perkebunan Sawit yang ada dalam kawasan Swamitra AirTiris
- f. Industri rumah tangga yang ada dalam kawasan Swamitra AirTiris⁴.

⁴ Sanzahidi. SE (Menejer Swamitra Air Tiris), Wawancara , Air Tiris 25 Juni 2013

BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Pengertian Koperasi dan Perjanjian Kredit

Koperasi berasal dari kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *Cooperative Vereniging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan.

Kata *Cooperaton* diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah KOPERASI, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya suka rela. Oleh karena itu koperasi dapat didefenisikan sebagai berikut:

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.¹

Salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tercapainya msyarakat yang adil dan makmur baik materil maupun spiritual adalah dengan berkoperasi.

¹ R.T. Sutantya Raharja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2005), h. 2.

UUD 1945 menegaskan didalam pembukaannya bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Penegasan diatas tidak terlepas dari pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia².

Landasan dan asas koperasi terdapat didalam UURI Nomor 17 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 2 dan pasal 3 dikatakan bahwa: “*koperasi berlandaskan Pancasila dan undang-undang dasar 1945, koperasi berdasar atas asas kekeluargaan*”. dari bunyi Pasal 2 itu jelas bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

UUD 1945 sebagai landasan koperasi juga ditegaskan dalam batang tubuh pasal 33 ayat 1 beserta penjelasannya, disitu dijelaskan secara eksplisit bahwa bangunan perusahaan yang sesuai dengan Pasal 1 adalah koperasi. Sedangkan asas koperasi sesuai dengan Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2012 adalah berasaskan kekeluargaan, asas ini sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Koperasi sebagai suatu usaha bersama harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam kehidupan keluarga. Dalam suatu keluarga, segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga, usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini biasanya disebut dengan gotong-royong³.

² Moh. Firdaus & Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah, Teori & Praktek*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), h. 37.

³*Ibid*, h. 42.

Koperasi berbeda dengan badan usaha komersial pada umumnya, sebagaimana dikemukakan oleh Ikatan Akutansi Indonesia, menyatakan:

Karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi (*user own oriented frim*), oleh karena itu:

- a. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama.
- b. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai kepercayaan diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetia kawatan, keadilan, persamaan, dan demokrasi. Selain itu anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan keperdulian terhadap orang lain.
- c. Koperasi didirikan, dibiayai, diatur, dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya.
- d. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota (*promotion of the members welfare*).
- e. Jika terdapat kelebihan maupun pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang non anggota koperasi.

Selain dipandang sebagai badan usaha yang memiliki bentuk dan karakteristik tersendiri, koperasi di Indonesia juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian. Hal ini sejalan dengan tujuan

koperasi sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 4 UURI No. 17 Tahun 2012 dikatakan bahwa:

“koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”.

Kemampuan koperasi dalam mencapai tujuannya merupakan alasan bagi anggotanya untuk tetap menjadi anggota.

Sebelum anggota mendapatkan dana pinjaman maka anggota tentunya menandatangani perjanjian. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan judul “perikatan” kata perikatan mempunyai arti lebih luas dibandingkan dari pada kata “perjanjian”. Dimana perikatan dapat diartikan sebagai sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu⁴. Sedangkan perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal⁵.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih*”. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa hubungan antara perikatan dengan perjanjian

⁴ Sebekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Internusa, 1992), h. 1.

⁵ *Ibid*, h.1.

adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan, sebab perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan selain Undang-Undang.

Dari pengertian perjanjian diatas agar suatu perjanjian mempunyai kekuatan maka harus dipenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

- 1) Syarat subjektif, syarat ini apabila dilanggar maka perjanjian dapat dibatalkan yang meliputi:
 - a. Sepakatnya mereka mengikatkan dirinya.
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 2) Syarat objektif, syarat ini apabila dilanggar maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum meliputi:
 - a. Suatu hal (obyek) tertentu.
 - b. Sebab yang halal.

Kesepakatan diantara para pihak diatur dalam Pasal 1321-1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kecakapan dalam rangka tindakan pribadi orang perorangan diatur dalam Pasal 1329-1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat tersebut merupakan syarat subjektif apabila tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan syarat objektif diatur dalam Pasal 1332-1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai keharusan adanya suatu obyek dalam perjanjian dan Pasal 1335-1337 mengatur mengenai kewajibannya adanya suatu causa yang halal dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. syarat tersebut merupakan syarat obyektif, apabila tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Perjanjian pada umumnya dibuat dengan maksud dan tujuan yang beraneka macam, salah satu tujuan tersebut berkaitan dengan pemberian atau permintaan kredit, istilah kredit dikenal dalam bahasa Yunani “*credre*” yang berarti percaya atau *to believe* atau *to trust*⁶. Oleh sebab itu dasar dari kredit itu adalah kepercayaan. Maksud kepercayaan bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti dikembalikannya sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit yang merupakan penerima kepercayaan mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Kredit menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan menyatakan: Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

Sedangkan pengertian perjanjian kredit berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contract credit*. Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam intruksi pemerintah dan berbagai surat sedaran, antara lain:

- a. Intruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EKA/10/96, yang berisi intruksi kepada bank bahwa dalam memberikan kredit bentuk apapun, bank-bank wajib menggunakan “akad perjanjian kredit”;

⁶ H. Mho. Tjoekam, *Perkreditasi Bisnis Inti Bank Komersial (Konsep teknik dan Kasus)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 12.

- b. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor: 2/539/UPK/Pemb/1996; dan
- c. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Nomor: 1/643/Pemb/1996 tentang Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan.

Dalam ketentuan tersebut tidak kita temukan pengertian perjanjian kredit, namun dalam Pasal 1 angka 3 Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan, telah ditentukan pengertian perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah:

“persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara antara kreditor dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati”.

Unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit tersebut adalah:

1. Adanya persetujuan dan/atau kesepakatan;
2. Dibuat bersama antara kreditor dan debitur;

Adanya kewajiban debitur, adalah:

1. Mengembalikan kredit yang telah diterimanya;
2. Membayar bunga, dan
3. Biaya-biaya lainnya.

Menurut *Sutan Remy Sadeini* ada 3 ciri dari suatu perjanjian kredit bank yang dilakukan antara kreditor dan debitur, yaitu:

1. Bersifat Konsensual artinya adalah perjanjian kredit merupakan ciri pertama yang membedakan dari perjanjian pinjam meminjam yang bersifat riil.

2. Penggunaan kredit yang tidak dapat digunakan secara leluasa artinya kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan tertentu oleh nasabah debitur.
3. Syarat cara penggunaannya artinya hal yang membedakan perjanjian kredit bank dari perjanjian peminjaman uang adalah mengenai syarat cara penggunaannya. Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan cara menggunakan cek atau perintah pemindah bukuan. Pada peminjaman uang biasa, uang yang dipinjamkan diserahkan seluruhnya oleh kreditur kedalam kekuasaan debitur dengan tidak disyaratkan cara debitur akan menggunakan uang pinjaman itu⁷.

B. Dasar Hukum Perjanjian Kredit

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian kredit dapat dilihat dan dibaca dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Nomor 10 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; dan
5. Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan.

⁷ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 78-81.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tidak secara khusus mengatur tentang perjanjian kredit. Namun dalam undang-undang yang secara khususnya nantinya akan mengatur tentang perjanjian bank adalah Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan⁸.

C. Bentuk-Bentuk Produk Pinjaman Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dibedakan berdasarkan sudut pendekatan yang dilakukan, antara lain:

1. Berdasarkan tujuan atau kegunaan.
 - a. Kredit konsumtif adalah kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya.
 - b. Kredit modal kerja (kredit perdagangan) yaitu kredit yang dipergunakan untuk meningkatkan modal usaha debitur.
 - c. Kredit investasi yaitu kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu relatif lama, biasanya kredit ini diberikan *graceperiod*, misalnya kredit untuk perkebunan kelapa sawit.

⁸*Ibid*, h. 82.

2. Berdasarkan sektor perekonomian

- a. Kredit pertanian yaitu kredit yang diberikan kepada perkebunan, peternakan dan perikanan.
- b. Kredit perindustrian yaitu kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah dan besar.
- c. Kredit pertambangan yaitu kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan.
- d. Kredit ekspor impor yaitu kredit yang diberikan kepada eksportir dan importir beraneka barang.
- e. Kredit koperasi yaitu kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi.
- f. Kredit profesional yaitu kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi seperti dokter dan guru.

3. Berdasarkan agunan/jaminan

- a. Kredit agunan orang yaitu kredit yang diberikan agunan seseorang terhadap debitur.
- b. Kredit agunan efek yaitu kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek dan surat-surat berharga.
- c. Kredit agunan barang yaitu kredit yang diberikan dengan agunan barang tetap, barang bergerak, dan logam mulia kredit ini harus memperhatikan hukum perdata Pasal 1132 sampai dengan 1139.
- d. Kredit agunan bangunan yaitu kredit yang diberikan dengan jaminan dokumen transaksi, seperti *Letter of Credit (L/C)*.

4. Berdasarkan penarikan dan pelunasan

- a. Kredit rekening koran (kredit perdagangan) kredit yang dapat ditarik dan dapat dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan atau penarikan: penarikan dengan cek, giro, bilyet atau pemindah pembukuan. Pelunasannya dengan setoran-setoran bunga dihitung dari saldo harian pinjaman saja bukan dari besarnya plafond kredit. Kredit rekening koran baru dapat ditarik setelah plafon kredit setuju.
- b. Kredit berjangka yaitu kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafonnya. Pelunasanya dilakukan setelah jangka waktu habis, pelunasan bisa dilakukan secara cicilan atau sekaligus tergantung kepada perjanjian⁹.

5. Berdasarkan jangka waktunya

- a. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun, digunakan untuk keperluan modal kerja.
- b. Kredit jangka menengah jangka waktunya berkisar satu sampai tiga tahun, biasanya digunakan untuk investasi.
- c. Kredit jangka panjang, jangka waktunya berkisar tiga sampai lima tahun digunakan untuk investasi jangka panjang¹⁰.

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung tujuan bank itu sendiri. Tujuan

⁹ H. Malayu SP. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001) h. 88-90.

¹⁰ Thomas Suyatno dan Kawan-kawan, *Dasar-dasar Perkreditan*, (Jakarta: STIE Perbanas & Garamedia Pustaka Utama, 1995), h. 26.

pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Dalam prakteknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan, adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2. Membantu usaha nasabah, adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu pemerintah, adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut:
 - a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
 - b. Membuka kesempatan kerja dalam hal ini untuk kredit pembanguana usaha baru atau pelunasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
 - c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat memiliki banyak pilihan.

- d. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.
- e. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor¹¹.

Adapun tujuan pemberian kredit yang lainnya adalah:

1) Bagi kreditur

- a) Pemberian kredit merupakan sumber utama pendapatan.
- b) Pemberian kredit merupakan perangsang produk-produk lainnya dalam persaingan
- c) Perkreditan merupakan instrumen penjaga likuidasi, solvabilitas, dan profitabilitas.

2) Bagi debitur

- a) Kredit berfungsi sebagai sarana untuk membuat kegiatan usaha makin lancar dan *performance* (kinerja) usaha semakin baik dari pada sebelumnya.
- b) Memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalam perusahaan.

3) Bagi masyarakat

- a) Kredit mengurangi pengangguran, karena membuka peluang berusaha, bekerja dan pemerataan pendapatan.
- b) Kredit meningkatkan fungsi pasar karena adanya peningkatan daya beli¹².

¹¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 105-106.

Sedangkan kredit sendiri mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan daya guna uang, apabila uang disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna, dengan pemberian kredit uang tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa oleh penerima kredit.
- 2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, dengan pemberian kredit uang itu akan beredar dari wilayah yang satu ke wilayah yang lain.
- 3) Untuk meningkatkan daya guna barang, dengan pemberian kredit kepada debitur dapat digunakan untuk mengelola barang yang tadinya tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat.
- 4) Meningkatkan peredaran barang, kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya.
- 5) Sebagai alat stabilitas ekonomi, dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat
- 6) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha¹³.

D. Jaminan Pemberian Kredit

Jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang. Tanggungan atas segala perikatan seseorang disebut dengan jaminan secara umum sedangkan tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang disebut jaminan secara khusus¹⁴.

¹² Thomas Suyatno, *Op.cit.*, h.15.

¹³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 97.

¹⁴ Oey Hoe Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h. 14.

Pengaturan umum tentang jaminan diatur dalam ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, dimana ditentukan bahwa segala kebendaan pihak yang berhutang (debitur) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.

Jaminan menurut Undang-Undang Perbankan diberi arti sebagai *“keyakinan akan itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”*¹⁵.

Hartono Hadisoeparto dan M. Bahasan berpendapat bahwa jaminan adalah *“sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”*¹⁶.

Dengan adanya pemberian jaminan oleh pihak debitur kepada kreditur, dimaksudkan dapat memberikan keyakinan bahwa kredit akan dilunasi sesuai dengan perjanjian. Untuk memberikan keyakinan maka sesuatu yang menjadi jaminan tersebut harus memenuhi persyaratan baik secara hukum/yuridis maupun secara ekonomis yang baik dan benar. Syarat-syarat hukum/yuridis meliputi:

1. Jaminan harus mempunyai wujud nyata (*tangible*).
2. Jaminan harus merupakan milik debitur dengan bukti surat-surat autentiknya.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 22.

¹⁶ H. Salim, *op.cit*, h. 22.

3. Jika jaminan merupakan barang yang dikuasakan pemiliknya harus ikut menandatangani akad kredit.
4. Jaminan tidak dalam proses pengadilan.
5. Jaminan tidak didalam keadaan sengketa.
6. Jaminan bukan yang karena proyek pemerintah

Syarat-syarat ekonomi meliputi:

1. Jaminan harus mempunyai nilai ekonomis pasar.
2. Nilai jaminan kredit harus lebih besar dari pada plafond kreditnya.
3. *Marketability*, yaitu jaminan harus mempunyai pasar yang cukup luas atau mudah dijual.
4. *Ascertainability of value*, yaitu jaminan kredit yang diajukan oleh debitur harus mempunyai standar harga tertentu (harga pasar).
5. *Transferable*, yaitu jaminan kredit yang debitur harus mudah dipindah tangankan baik secara fisik maupun secara hukum¹⁷.

¹⁷ H. Malayu SP Hasibuan *op.cit*, h.110

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Nasabah dan Unit Simpan Pinjam Swamitra

Berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian penulis melakukan penelitian dengan berdasarkan atau memperhatikan isi dari perjanjian yang dibuat, kemudian melakukan wawancara langsung dengan karyawan Koperasi Swamitra Air Tiris dannasabahagar mendapatkan fakta yang benar-benar terjadi. Dari 40 orang debitur sebanyak 23 orang dari populasi debitur mengalami masalah, baik itu yang kredit macet maupun yang berpotensi pada kredit macet. Sampel yang diambil adalah 10 orang yang bermasalah kemudian ditambah 2 orang dari karyawan swamitra. Melakukan wawancara ini bertujuan agar apa yang penulis teliti dapat langsung penulis pahami, kemudian akan penulis jabarkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk penelitian. Untuk lebih sistematisnya penelitian dan pembahasan penulis, maka penulis melakukan pembagian-pembagiannya.

1. Pengajuan Permohonan

Setiap calon nasabah yang akan melakukan pinjaman pada Koperasi Swamitra Air Tiris terlebih dahulu akan mengajukan permohonan. Mengajukan permohonan harus dilakukan oleh setiap nasabah karena langkah awal dari peminjaman tersebut yaitu dengan mengajukan

permohonan¹. Setelah mengajukan permohonan maka calon nasabah akan memenuhi syarat yang telah ditetapkan Koperasi Swamitra Air Tiris yaitu sebagai berikut:

- a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pinjaman
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri 3 rangkap
- c. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Akte Nikah sebanyak 3 rangkap
- d. Foto copy surat izin usaha
- e. Foto copy dokumen, bukti kepemilikan yang dijadikan jaminan 3 rangkap
- f. Melampirkan bukti-bukti pendukung lainnya berupa faktur jual beli 3 bulan terakhir.
- g. Pas foto 3x4
- h. Bahan dimasukkan kedalam map tulang.

Menurut nasabah yang penulis wawancarai, memenuhi persyaratan adalah wajib bagi setiap nasabah yang ingin meminjam untuk tambahan modal usahanya².

Menurut pimpinan Swamitra Air Tiris yang penulis wawancarai, setiap calon nasabah yang ingin meminjam pada Koperasi Swamitra Air Tiris mereka sebelumnya harus membuat sebuah permohonan, setelah permohonan diproses dan diterima maka dapat dilanjutkan (sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Koperasi Swamitra Air Tiris) yaitu yang tertera pada pembahasan sebelumnya. Apabila calon nasabah tidak

¹ Rahmat (Nasabah Koperasi Swamitra Air Tiris), Wawancara, Air Tiris 2 Juli 2013.

² Niarti (Nasabah Koperasi Swamitra Air Tiris), Wawancara, Air Tiris 2 Juli 2013.

mengajukan permohonan sebelumnya maka keinginannya untuk melakukan pinjaman tidak akan diproses oleh Koperasi Swamitra Air Tiris³.

Setiap permohonan pinjaman harus dianalisa kelayakan usahanya dengan senantiasa memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pengenalan yang benar-benar mendalam atas pinjaman yang mencakup aspek karakter, pengalaman dan kemampuan mengelola usaha serta modal sendiri yang dimiliki (Aspek Karakter).
- b. Keyakinan yang mendalam bahwa usaha yang dibiayai benar-benar usaha yang layak dan mempunyai potensi untuk berkembang.
- c. Penelaahan yang mendalam atas tujuan penggunaan pinjaman, guna menghindarkan diri dari resiko akibat kesalahan dalam penetapan ketentuan, persyaratan pinjaman.
- d. Mengkaji yang seksama atas kemampuan pembayaran kembali.
- e. Analisis dan perhitungan yang tepat mengenai agunan pinjaman.
- f. Memperhitungkan dan memperhatikan kebijaksanaan pricing agunan guna menghindarkan resiko yang timbul akibat kesalahan penetapan tingkat bunga.
- g. Mencantumkan secara transparansi analisis atas manfaat dan resiko yang timbul akibat pemberian pinjaman, baik yang berupa financial maupun legal yang terjadi sebelumnya, selama maupun sesudah pemberian

³ Sanzahidi. SE (Menejer Swamitra Air Tiris), Wawancara, Air Tiris 19 Juli 2013.

pinjaman atau pemberian komitmen lain yang dapat menimbulkan kewajiban bagi swamitra⁴.

Berdasarkan wawancara penulis dengan nasabah yang telah melakukan peminjaman pada Koperasi Swamitra Air Tiris dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) membenarkan bahwa setiap peminjam yang mengajukan permohonan dianalisa dengan baik kelayakan usaha yang dijalankannya yaitu dengan melihat kelengkapan data, menanyakan serta memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan usaha yang dijalankannya⁵.

Kelengkapan pendataan dalam menganalisa usaha debitur dilakukan dengan hati-hati, itu dilakukan selain untuk prosedur juga untuk menghindari diri dari resiko-resiko yang akan timbul dikemudian hari⁶.

Setelah diperiksa kelengkapan dokumen atau file oleh *account officer*, maka karyawan Swamitra akan memeriksa laporan keuangan calon nasabah baik itu laba yang didapatnya maupun rugi yang ditanggungnya setiap bulan. Hal ini harus dilakukan oleh Koperasi Swamitra Air Tiris sesuai dengan asas kehati-hatian, untuk menghindarkan diri dari pemberian pinjaman yang spekulatif dan beresiko tinggi.

Setelah pengecekan selesai dilakukan, maka berkas akan diteruskan padakredit suport untuk dicek lagi kelengkapannya dan akan diteruskan kerencana pembuatan jadwal surve di lapangan untuk memastikan dan melihat usaha yang dilakukannya dan barang yang akan dijaminan olehnya

⁴ Dokumentasi Koperasi Swamitra Air Tiris.

⁵ Mardison (Nasabah Koperasi Swamitra Air Tiris), Wawancara, Air Tiris 2 Juli 2013.

⁶ Sanzahidi. SE (Menejer Swamitra Air Tiris), Wawancara, Air Tiris 19 Juli 2013.

apakah sudah sesuai atau belum. Apabila semua telah layak, maka Komite akan meminta persetujuan dari Bank Bukopin untuk memberikan dana pinjaman kepada calon nasabah tersebut.

2. Penandatanganan kontrak atau perjanjian

Setelah semua hal yang berhubungan dengan permohonan, pemeriksaan dan yang lainnya dirasa lengkap, maka akan di buat akad kredit. Akad atau perjanjian tersebut dibuat setelah mendapat persetujuan dari calon nasabahnya. Penandatanganan perjanjian merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap calon nasabah Koperasi Swamitra Air Tiris agar hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terwujud dan disetujui bersama-sama.

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan tentang perjanjian yaitu:

“Perjanjian adalah satu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya”

Jika diperhatikan dari rumusan yang dipaparkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut ternyata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti bahwa dalam suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau perestasi dari satu atau lebih orang kepada satu atau lebih orang lainnya yang harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut.

Dengan demikian, rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana

satu pihak merupakan pihak yang wajib berprestasi atau memberikan prestasi (debitur) dan pihak yang lain merupakan pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur)⁷.

Perjanjian yang ditandatangani antara koperasi swamitra dengan nasabah adalah perjanjian baku, dimana perjanjian tersebut sebelumnya telah dibuat oleh pihak swamitra⁸.

Akad kredit atau perjanjian merupakan hal yang mutlak harus ada dalam suatu pinjam meminjam baik dalam bentuk perjanjian dibawah tangan maupun perjanjian yang dilakukan dihadapan notaris. Nasabah atau debitur dan Koperasi Swamitra Air Tiris atau kreditur akan melakukan penandatanganan perjanjian. Perjanjian tersebut sebelumnya telah dibuat oleh pihak swamitra, maka dari pihak nasabah hanya dapat membacanya saja dan memahami isi dari perjanjian yang dilakukan. Koperasi Swamitra Air Tiris menyatakan bahwa hal itu benar adanya, hal itu juga dilakukan karena sebagian calon nasabah tidak mau terlalu ambil pusing dalam masalah perjanjian, yang penting pinjamannya dapat sesegera mungkin dicairkan⁹.

Perjanjian yang dibuat oleh koperasi swamitra dapat dikatakan perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir¹⁰. Artinya adalah isi dari perjanjian

⁷Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 248-249.

⁸Niarti (Nasabah Koperasi Swamitra Air Tiris), wawancara, Air Tiris 2 Juli 2013.

⁹Sanzahidi. SE (Menejer Swamitra Air Tiris), Wawancara, Air Tiris 19 Juli 2013.

¹⁰H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 145.

tersebut hanya dibuat oleh satu pihak saja tanpa adanya keikutsertaan pihak yang satunya, sehingga pihak yang satunya hanya diminta menerima atau menolak isi dari perjanjian tersebut.

Menurut *Mariam Darus Badruzaman* mengemukakan ciri-ciri dari perjanjian baku. Ciri dari perjanjian baku tersebut, yaitu:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya(ekonominya) kuat;
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi dari perjanjian;
3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4. Bentuk tertentu (tertulis);
5. Dipersiapkan secara masal dan kolektif¹¹.

Dalam perjanjian tersebut ada yang berbentuk interen, yaitu perjanjian dibawah tangan dan ada juga yang berbentuk Notarial atau perjanjian melalui Notaris.

Bentuk perjanjian kredit dibagi dua yaitu Akta dibawah tangan yang diatur pada Pasal 1874 BW, merupakan akta perjanjian yang baru memiliki kekuatan hukum pembuktian apabila diakui oleh pihak-pihak yang menandatangani dalam akta perjanjian tersebut. Agar akta ini tidak mudah dibantah maka diperlukan pelegalisiran oleh notaris, agar memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat seperti akta autentik.

Kemudian dalam bentuk akta autentik, merupakan akta perjanjian yang memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna, karena ditanda

¹¹*Ibid*, h. 146.

tangani langsung oleh pejabat pembuat akta, yaitu Notaris, dan akta ini dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan keabsahannya dari tandatangan pihak lain.

Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dan Unit Simpan Pinjam Swamitra, dalam perjanjian tersebut tidak akan pernah terlepas dari pengaturan hak dan kewajiban para pihak yaitu pihak nasabah dan pihak Swamitra. Sebagaimana diatur dalam kontrak atau di dalam perjanjian bahwa para pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing yaitu hak dan kewajiban Koperasi Swamitra dan hak serta kewajiban nasabah.

Berdasarkan surat perjanjian, pemberian kredit antara kreditur dan debitur merupakan dasar pelaksanaan perjanjian kredit. Diketahuinya hak dan kewajiban para pihak didasarkan pada pasal-pasal yang telah dibuat sebelumnya. Dalam perjanjian tersebut telah diketahui beberapa hak dan kewajiban.

1. Hak dan kewajiban Koperasi Swamitra Air Tiris

Adapun hak dari Koperasi Swamitra Air Tiris dapat dilihat dalam surat perjanjian kredit, hal itu diatur dalam Pasal 5, Surat Perjanjian yang berisikan :

“Debitur dengan ini menyatakan persetujuannya apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran kewajiban bunga dan atau angsuran pokok apabila dalam batasan waktu berlakunya kredit ini belum melunasi secara seksama dan sepatutnya seluruh jumlah kredit berikut bunga dan biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan perjanjian ini, maka kreditur berhak memperhitungkan denda (penalty overdue) terhadap debitur sebesar 4% (empat persen)

setiap bulan dari seluruh kewajiban debitur kepada kreditur yang tertunda dan dihitung secara harian”¹².

Berdasarkan surat perjanjian diatas, dapat dipahami bahwa apabila terjadi keterlambatan oleh debitur untuk membayar kewajibannya, maka kreditur berhak memperhitungkan denda yang akan dibebankan setiap bulannya dari seluruh kewajiban debitur. Denda yang dibebankan kepada debitur merupakan akibat dari keterlambatan debitur itu sendiri.

Adapun kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh Koperasi Swamitra Air Tiris yang dipedomani pada Surat Perjanjian Kredit dapat dilihat dari berbagai pasal yang ada dalam surat perjanjian tersebut, salah satunya terdapat pada Pasal 1 Surat Perjanjian Kredit yang berisikan :

“Kreditur telah memberikan debitur pinjaman uang berupa fasilitas kredit modal kerja yakni kredit komersil sesuai dengan nilai pinjaman dan debitur menyatakan mengaku dan menerima pinjaman uang tersebut akan digunakan untuk menambah modal kerja, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut pinjaman”¹³.

Ketika debitur telah menandatangani perjanjian maka pemberian dana dengan segera diberikan oleh koperasi swamitra asal memenuhi syarat yang ditetapkan koperasi swamitra tersebut¹⁴.

Kewajiban dari Koperasi Swamitra Air Tiris yakni memberikan pinjaman uang berupa fasilitas modal kerja yaitu kredit komersil yang harus digunakan sebagai modal kerja sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak. Hal ini dilakukan oleh Koperasi

¹² Pasal 5 Surat Perjanjian Kredit pada Koperasi Swamitra Air Tiris.

¹³ Pasal 1 perjanjian kredit pada Koperasi Swamitra Air Tiris.

¹⁴ Gusnarti (Nasabah Koperasi Swamitra Air Tiris), wawancara, Pulau Sarak 4 Juli 2013.

Swamitra Air Tiris agar tercapainya tujuan dari Koperasi Swamitra yaitu: untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penyaluran kredit kepada setiap nasabah dari waktu-kewaktu¹⁵.

2. Hak dan kewajiban debitur

Hak debitur dalam perjanjian tersebut terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 yang berbunyi:

“Pinjaman dapat dicairkan sekaligus, setelah debitur memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh kreditur dan setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh kedua belah pihak”.

Sebagaimana yang tertera dalam Surat perjanjian kredit diatas, pinjaman debitur dapat dicairkan secara langsung setelah perjanjian kredit ditandatangani dan juga telah memenuhi syarat yang ditetapkan. Hal tersebut dibenarkan oleh nasabah yang penulis wawancarai, artinya adalah hak dari debitur tersebut sudah dipenuhi oleh kreditur.

Menurut karyawan Swamitra, debitur yang telah menandatangani perjanjian kredit akan diberikan haknya, yaitu memperoleh dana untuk usaha yang dikehendaki olehnya. Hak tersebut harus diberikan oleh Koperasi Swamitra kepada debitur¹⁶.

Menurut nasabah yang penulis wawancarai, haknyatersebut telah dipenuhinya.Selain dari pada hak, debitur juga mempunyai kewajiban terhadap Koperasi Swamitra yaitu melunasi pinjaman setiap bulan beserta dengan bunganya¹⁷.

¹⁵ Sanzahidi. SE (Menejer Swamitra Air Tiris), Wawancara, Air Tiris 19 Juli 2013.

¹⁶ Khairul (Karyawan Swamitra Air Tiris), wawancara, Air Tiris 18 Juli 2013

¹⁷ Rohman (Nasabah Koperasi Swamitra Air Tiris), wawancara, Kampar 4 Juli 2013

Menurut karyawan Swamitra Air Tiris masih ada sebagian dari nasabah yang tidak menepati janjinya atau tidak melakukan kewajibannya dengan baik dan benar, yaitu nasabah yang kredinya tidak lancar. Dimana mereka tidak membayar kewajibannya yakni membayar uang pinjaman tiap bulan beserta bunganya. Setelah debitur memperoleh dana untuk menjalankan usahanya maka debitur harus menngembalikan uang yang telah dipinjamkan oleh koperasi swamitara dimana hutang tersebut merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah beserta dengan bunganya sebagaimana yang telah diperjanjiakan¹⁸. Kewajiban tersebut juga tercantum dalam surat perjanjian pada pasal 4 ayat 1 yaitu:

“Pinjaman diberikan untuk jangka 12 bulan terhitung sejak tanggal pinjaman sampai berakhirnya waktu pinjaman, sehingga karenanya debitur harus membayar lunas kepada kreditur pada saat berakhirnya jangka waktutersebut seluruh kewajibannya berupa hutang pokok, bungan dan biaya-biaya lainnya secara sekaligus”¹⁹.

Kewajiban dari debitur dalam pelaksanaan pemberian pinjaman ini diatur dalam pasal 1763 KUHPerdata. Menurut pasal tersebut siapa yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan²⁰. Menurut pasal 1764 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa si peminjam tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka dia diwajibkan membayar harganya dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana harganya, menurut perjanjian harus dikembalikan.jika waktu dan tempat ini tidak telah ditetapkan, harus

¹⁸ Khairul (Karyawan Swamitra Air Tiris), wawancara, Air Tiris 18 Juli 2013.

¹⁹ Pasal 4 Ayat 1 Surat perjanjian Koperasi Swamitra Air Tiris.

²⁰ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *op.cit.*, h.452.

diambil harga barang pada waktu dan tempat dimana pinjaman telah terjadi²¹.

Setelah debitur memenuhi hak dan kewajibannya, debitur tersebut dapat menentukan nilai pinjaman yang akan di berikan oleh Koperasi Swamitra Air Tiris.

Menurut nasabah yang penulis wawancara, nilai pinjaman yang diberikan Koperasi Swamitra cukup besar sehingga dapat membantu kelancaran usahanya agar dapat berkembang. Akan tetapi menurut beberapa nasabah lainnya, nilai pinjaman yang diberikan Koperasi Swamitra tidak lah banyak, dan hal itu dirasakan sangat kurang untuk mengembangkan usahanya yang membutuhkan lebih dari nilai tersebut²².

Berdasarkan wawancara penulis dengan pimpinan koperasi swamitra mengenai nilai pinjaman yang terdapat pada koperasi swamitra, minimal nilai pinjaman yang diberikan pada nasabah tersebut Rp. 5.000.000,- dan maksimal dari nilai pinjaman yang diberikan pada nasabah yaitu Rp. 150.000.000,- para nasabah dapat menentukan berapa pinjaman yang diinginkannya. Akan tetapi pinjaman tersebut harus disesuaikan dengan pendapatan dari nasabah tersebut, agar nantinya pemenuhan kewajibannya dapat terlaksana sesuai dengan kesepakatan²³.

Menurut nasabah yang penulis wawancara selain dari nilai pinjaman yang diberikan koperasi swamitra, bunga yang dibebankan

²¹ R. Subekti, *op.cit*, h.128.

²² Yeni surianti (Nasabah Koperasi Swamitra Air Tiris), wawancara, Batu Belah 12 Juli 2013.

²³ Sanzahidi. SE (Menejer Swamitra Air Tiris), Wawancara, Air Tiris 19 Juli 2013.

koperasi swamitra cukup besar juga mengingat pendapatan dari nasabah tidak begitu terlalu besar, sehingga keuntungan usaha yang didapatnya hanya digunakan untuk membayar uang pinjaman beserta dengan bunganya²⁴.

Menurut pimpinan koperasi swamitra yang penulis wawancara, dalam hal penetapan bunga pada pinjaman kredit koperasi swamitra menetapkan besar bunga yang diberikan kepada nasabah sebesar 25%, dan bunga yang dibebankan ini sewaktu-waktu dapat berubah²⁵.

3. Pencairan Pinjaman

Adalah realisasi pemberian pinjaman kepada peminjam sesuai persyaratan yang telah disepakati bersama antara Koperasi Swamitra dan peminjam. Kewajiban ini haruslah didasarkan pada putusan komite peminjam yang tertuang dalam permohonan pinjaman, pencairan pinjaman ini dilakukan apabila:

- a. Fasilitas pinjaman yang diajukan oleh pembina pinjaman telah mendapat persetujuan dari komite pinjaman sesuai dengan limitnya.
- b. Peminjam memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan Koperasi Swamitra.
- c. Seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan fasilitas pinjaman yang telah disetujui oleh komite pinjaman yang telah dipenuhi dan

²⁴ Budiman (Nasabah Koperasi Swamitra Air Tiris), Wawancara, Air Tiris 15 Juli 2013.

²⁵ Sanzahidi. SE (Menejer Swamitra Air Tiris), Wawancara, Air Tiris 26 Juli 2013

diselesaikan, dan Swamitra mendapatkan perlindungan yang memadai atas hal tersebut.

- d. Telah melunasi seluruh biaya dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas pinjaman yang disetujui.
- e. Fasilitas pinjaman tersebut telah memenuhi persyaratan swamitra secara teknis²⁶.

Pencairan dilaksanakan setelah semua persyaratan, pemeriksaan, dan penyerahan jaminan diselesaikan yang dilakukan oleh karyawan Koperasi Swamitra Air Tiris.

B. Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dan Unit Simpan Pinjam Swamitra

Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut masing-masing pihak harus lah melaksanakan kewajibannya, dimana pihak nasabah berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sampai tenggang waktu yang ditentukan koperasi Swamitra Air Tiris, begitu pun pihak swamitra haruslah mengawasi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh nasabahnya tersebut.

Apabila kreditur tidak hati-hati dalam memilih atau menyeleksi calon debitur untuk meminjamkan uang, hal itu akan beresiko bagi lembaga keuangan tersebut dan akan menimbulkan masalah yang dapat berakibat pada kredit macet.

²⁶ Dokumentasi Koperasi Swamitra Air Tiris.

Banyak faktor yang menyebabkan pelaksanaan perjanjian tidak berjalan dengan baik, pada umumnya adalah usaha tidak lancar sehingga gulung tikar dan persaingan pasar²⁷.

Menurut penjelasan pimpinan koperasi swamitra Air Tiris terdapat beberapa faktor penyebab debitur melakukan wanprestasi yaitu faktor keluarga, faktor usaha dan faktor lingkungan.

1. Faktor keluarga yaitu, debitur tidak hanya menggunakan dananya untuk usaha saja tetapi juga diperlukan untuk keperluan lain seperti keperluan sehari-hari dan keperluan rumah tangganya inilah yang membuat nasabah mengalami kerugian dalam usahanya dan berdampak terhadap koperasi Swamitra dalam hal pengembalian angsuran pokok dan pembayaran bunga.
2. Faktor usaha yaitu, usaha tidak lancar dan persaingan pasar merupakan penyebab tidak lancarnya usaha yang dijalankan.
 - a. Usaha yang tidak lancar juga diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya:
 - a) Naiknya harga barang sehingga kurang lancarnya penjualan.
 - b) Pasokan dagangan yang sulit untuk didapat. Terlebih lagi nasabah tidak dapat menjalankan usahanya karena tidak dapat membeli bahan baku yang harganya terus naik, sehingga tidak mampu membayar tenaga kerjanya.
 - b. Selain faktor diatas persaingan pasar juga merupakan kendala untuk melakukan prestasi yang telah disepakati dalam surat perjanjian kredit.

²⁷ Adianto (Nasabah Koperasi Swamitra Air Tiris), wawancara, Air Tiris 15 Juli 2013

Dengan berkembangnya usaha-usaha yang sama dipasar membuat persaingan sangat kuat yang mengakibatkan kemacetan terhadap usahanya, sehingga usaha tidak mendapatkan keuntungan, yang mana dengan keuntungan tersebut debitur dapat membayar angsuran pokok dan bunga pinjamannya.

3. Faktor lingkungan, dimana debitur tidak memperdulikan dan merubah bentuk dari kendaraan yang dijaminkan pada kreditur, sehingga nilai jual dari jaminan tersebut menjadi turun dari bentuk fisik yang semula, serta menyewakan barang jaminan tanpa sepengetahuan atau persetujuan kreditur²⁸.

Dalam Surat Perjanjian Kredit Pasal 8 Huruf b menjelaskan bahwa:

“DEBITUR dilarang menyewa / memindahkan/mengalihkan barang jaminan berikut haknya dengan cara apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari KREDITUR”²⁹.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Pasal 8 Huruf b tersebut, menjelaskan bahwa menyewa memindahkan serta mengalihkan barang jaminan tanpa sepengetahuan kreditur atau pihak koperasi swamitra adalah dilarang. Hal tersebut dilakukan untuk menghindarkan diri dari kerugian yang diakibatkan perbuatan debitur.

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur biasanya diakibatkan karena debitur menyalah gunakan kredit atau pinjaman tersebut. Maka debitur tidak lagi lancar membayar pinjamannya dan pada akhirnya

²⁸ Sanzahidi. SE (Menejer Swamitra Air Tiris), Wawancara, Air Tiris 26 Juli 2013.

²⁹ Pasal 8 Huruf b Surat perjanjian Koperasi Swamitra Air Tiris.

membuat kreditnya macet. Serta yang menjadi faktor peminjam melakukan wanprestasi adalah adanya iktikad buruk dari peminjam itu sendiri.

Ketidak jujuran nasabah dan tidak adanya iktikad baik dalam pelaksanaan tersebut membuat nasabah melakukan wanprestasi, dimana mereka harusnya melaksanakan perjanjian tersebut dengan baik dan benar sehingga tercapailah prestasi dengan baik.

Menurut nasabah yang penulis wawancarai, kesalahan datangnya tidak hanya dari nasabah saja tapi juga datang dari pihak swamitra itu sendiri, dimana kurangnya pengawasan dan pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh koperasi swamitra³⁰.

Hal tersebut diakui oleh pimpinan Koperasi Swamitra Air Tiris, bahwa kurangnya pengawasan serta pembinaan diakibatkan keterbatasan dari koperasi swamitra, dimana mengingat dari sekian banyak nasabah hanya ditangani oleh beberapa karyawan, hal tersebut diakibatkan kurangnya tenaga kerja yang turun kelapangan untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap nasabah³¹.

Selain hal diatas, penulis juga ingin menambahkan Faktor lain yang menyebabkan nasabah tidak melaksanakan kewajibannya adalah karena kondisi ekonomi nasabah yang rendah, kemauan debitur untuk membayar utangnya sangat rendah, nilai jaminannya lebih kecil dari jumlah utang pokok dan bunga, usaha nasabah bangkrut, kurang terbukanya debitur kepada kreditur terhadap masalah usaha yang dihadapinya, dan manajemen

³⁰ Budiman (Nasabah Koperasi Swamitra Air Tiris), Wawancara, Air Tiris 15 Juli 2013.

³¹ Sanzahidi. SE (Menejer Swamitra Air Tiris), Wawancara, Air Tiris 26 Juli 2013.

usaha nasabah sangat lemah. Sehingga nasabah tidak dapat menemukan jalan lain.

Kemudian kesalahan memang tidak sepenuhnya dari nasabah saja, tetapi itu juga tidak terlepas dari tanggungjawab pihak swamitra sendiri. Kurangnya perhatian dan pengawasan terhadap nasabah yang dilakukan oleh pihak Swamitra, membuat celah kepada nasabah untuk dapat melakukan wanprestasi.

C. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dan Unit Simpan Pinjam Swamitra

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan oleh nasabah ini, nasabah haruslah menjalankan kewajibannya sesuai dengan yang seharusnya yaitu untuk mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan.

Apabila nasabah terlambat dalam mengembalikan pinjamannya, maka Koperasi Swamitra akan memberikan sanksi yaitu berupa:

1. Surat teguran
2. Dikenai denda.

Menurut nasabah yang penulis wawancara, keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman memang ada resiko yaitu mendapatkan teguran dan denda dari keterlambatannya untuk membayar. Mengenai hal tersebut memang

telah dijelaskan oleh karyawan swamitra dari awal sebelum mendapatkan pinjaman dan juga tertera dalam surat perjanjian kredit³².

Pimpinan koperasi swamitra menyatakan nasabah yang tidak melaksanakan perjanjiannya dengan baik maka mereka termasuk dalam peminjam yang bermasalah³³. Peminjam yang bermasalah adalah semua peminjam dalam kategori kolektibilitas dan fasilitas pinjaman yang masih tergolong lancar namun cenderung memburuk pada bulan-bulan selanjutnya serta fasilitas pinjaman yang diragukan dapat dibayar kembali secara wajar³⁴.

Keterlambatan nasabah dalam mengembalikan angsuran pokok dan bunga pinjaman dalam waktu yang telah diperjanjikan, tidak akan diadakannya penyitaan terhadap barang jaminan, tetapi peminjama hanya akan dikenakan sanksi berupa denda 4 % setiap bulannya.

Menurut Pasal 1243 KUH Perdata menjelaskan tentang penggantian biaya, denda dan ganti rugi karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, yaitu:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melaliakannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikana atau dibuat dalam tengga waktu yang telah dilampaukannya”

Jika diperhatikan Pasal 1243 KUH Perdata tersebut menjelaskan bahwa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat dinyatakan pada seseorang apabila lalai dalam memenuhi perjanjiannya atau perikatan.

³² Firman (Nasabah Koperasi Swamitra Air Tiris), Wawancara, Penyasawan 22 Juli 2013.

³³ Sanzahidi. SE (Menejer Swamitra Air Tiris), Wawancara, Air Tiris 26 Juli 2013.

³⁴ Dokumentasi Koperasi Swamitra Air Tiris.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si terhutang diancam beberapa sanksi atau hukuman, antara lain:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan dengan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkara di depan hakim³⁵.

Wanprestasi adalah salah satu pihak tidak melaksanakan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dan disepakati dalam surat perjanjian tersebut³⁶.

Dengan demikian nasabah akan dikenakan denda dalam hal keterlambatan atau terjadinya penangguhan dalam hal mengembalikan angsuran pokok yang telah ditetapkan oleh Koperasi Swamitra. Apabila dalam jangka 3 (tiga) bulan berturut-turut nasabah tidak membayar angsuran dan tidak menanggapi surat teguran dari koperasi swamitra, maka nasabah dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi terhadap pinjamannya dan pihak Koperasi Swamitra akan melakukan tindakan terhadap barang jaminan dengan cara menyita barang jaminan dan akan melakukan upaya hukum.

Menurut nasabah yang penulis wawancara, terhadap wanprestasi yang dilakukannya menginginkan penyelesaiannya diluar dari pengadilan agar tidak bertambahnya biaya yang dikeluarkan dan tidak sampai menyita waktunya³⁷.

³⁵ R. Subekti, *op.cit.*, h. 45.

³⁶ Sanzahidi. SE (Menejer Swamitra Air Tiris), Wawancara, Air Tiris 26 Juli 2013.

³⁷ Diana (Nasabah Koperasi Swamitra Air Tiris), Wawancara, Air Tiris 18 Juli 2013.

Dari hasil wawancara penulis dengan pimpinan koperasi swamitra menjelaskan penyelesaian yang dilakukan oleh koperasi swamitra adalah dengan beberapa cara yaitu: penyelesaian pinjaman diluar pengadilan dan penyelesaian pinjaman didalam pengadilan³⁸.

Penyelesaian diluar Pengadilan yaitu dapat berupa Penghapusan pinjaman (hapus buku maupun hapus tangih), Offset jaminan dan Penjualan jaminan. Upaya Penyelesaian pinjaman diluar pengadilan tersebut dapat dilakukan oleh: Aparat swamitra sendiri, Pihak ketiga yang ditujuk oleh Swamitra dan Pengacara yang ditunjuk. Sedangkan Penyelesaian didalam pengadilan dapat berupa Gugatan Perdata dan Eksekusi jaminan.

Akan tetapi jalan yang diambil Koperasi Swamitra adalah penyelesaian diluar pengadilan mengingat biaya yang dikeluarkan sangatlah banyak bahkan melebihi dari yang diselesaikan tersebut, serta waktu yang cukup lama dalam penyelesaian sengketa debitur yang melakukan wanprestasi akan disita jaminannya.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh koperasi Swamitra mengenai upaya-upaya atau tindakan-tindakan hukum terhadap adanya wanprestasi yaitu:

1. Koperasi Swamitra akan melakukan penagihan dengan mengirimkan surat peringatan atau surat teguran kepada nasabah yang bermasalah tersebut terhadap pengembalian angsuran pokok beserta dengan bunganya sesuai dengan kesepakatan dalam surat perjanjian kredit.

³⁸ Sanzahidi. SE (Menejer Swamitra Air Tiris), Wawancara, Air Tiris 26 Juli 2013.

2. Setelah pengiriman surat teguran dilakukan tiga kali dan tidak juga diindahkan oleh debitur, maka langkah selanjutnya yang diambil oleh pihak Swamitra adalah turun langsung kelapangan untuk menagih pinjaman tersebut dan untuk mengetahui secara jelas apa penyebab dari nasabah melakukan wanprestasi.
3. Apabila dengan penagihan langsung juga tidak berhasil, maka koperasi swamitra akan melakukan musyawarah bersama-sama dengan cara kekeluargaan dengan peminjam mengenai penyelesaiannya dan barang jaminan.
4. Apabila jalan musyawarah juga tidak menenukan titik terang atau penyelesaian, maka pihak Koperasi Swamitra akan melelang barang jaminannya tanpa melalui Pengadilan Negeri melainkan atas kebijakan dari Koperasi Swamitra³⁹.

Jadi dalam penyelesaian masalah wanprestasi koperasi Swamitra Air Tiris lebih memilih penyelesaian di luar lingkungan Pengadilan Negeri, mengingat biaya yang akan dikeluarkan lebih banyak waktu pun juga tersita untuk memperkarakan persoalan ini kepengadilan. Cara musyawarah atau kekeluargaan menurut kedua belah pihak lebih baik, apakah barang jaminanya tersebut akan akan dilelang atau akan dilakukan tindakan penyelamatan itu tergantung dari hasil musyawarah kedua belah pihak.

Penyelesaian masalah wanprestasi pada perjanjian pinjaman kredit dengan jaminan BPKB motor pada Koperasi Swamitra Air Tiris terdapat

³⁹ Sanzahidi. SE (Menejer Swamitra Air Tiris), Wawancara, Air Tiris 26 Juni 2013

hambatan-hambatan, dimana hambatan tersebut adalah sulitnya menjual barang jaminan dan harga barang jaminan tidak seimbang dengan sisa pinjaman yang akan dilunasi. Kendala seperti inilah yang sangat menyulitkan Koperasi Swamitra untuk menyelesaikan masalah wanprestasi.

Dengan demikian agar terciptanya sikap kekeluargaan dan gotong-royong maka Koperasi Swamitra Air Tiris memberikan keringanan untuk mengembalikan angsuran pokok dan membayar bunga kepada nasabah agar barang jaminan tersebut tidak dilelang dan nasabah tersebut mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kembali barang jaminan.

Upaya penyehatan dan penyelamatan pinjaman dilakukan Koperasi Swamitra untuk mendapatkan kepastian penyelesaian pembayaran kembali atau pelunasan sekaligus mengiagat kapasitas pinjaman dalam memenuhi kewajibannya. Kebijakan dalam melakukan penyelamatan dan penyehatan pinjaman adalah untuk peminjam yang menurut keyakinan swamitra usahanya masih dapat dikembangkan serta adanya itikad dari peminjam untuk menyelesaikan fasilitas pinjaman yang diterimanya. Penyehatan dan penyelamatan pinjaman tersebut dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), adalah perubahan syarat pinjaman yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pinjaman yang tidak hanya terbatas pada perubahan

jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafond pinjaman.

3. Penataan kembali (*restructuring*), adalah perubahan struktur fasilitas pinjaman yang menyangkut:
 - a. Penambahan dana dari Swamitra dengan tujuan melancarkan kembali usaha pemijam atau
 - b. Penataan kembali dapat disertai dengan penjadwalan kembali.
4. Tindakan-tindakan lain yang diapandang perlu oleh Swamitra dalam melakukan penyehatan dan penyelamatan pinjaman. Misalnya:
 - a. Keikutsertaan dalam pengelolaan usaha (informasi)
 - b. Mengikutsertakan pihak ketiga dalam usaha penyelamatan atau mengalihkan pinjaman kepada pihak ketiga.
 - c. Dan lain-lain⁴⁰.

Itulah upaya-upaya dan tindakan-tindakan yang dilakukan Koperasi Swamitra Air Tiris dalam menyelesaikan masalah wanprestasi yang dilakukan oleh nasabahnya.

⁴⁰ Sanzahidi. SE (Menejer Swamitra Air Tiris), Wawancara, Air Tiris 26 Juli 2013

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dan Koperasi Swamitra dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dilakukan dengan beberapa cara atau beberapa tahap yaitu, dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kemudian akan di proses oleh Koperasi Swamitra, apabila calon nasabah yang ingin meminjam tidak mengajukan permohonan terlebih dahulu maka keinginannya untuk meminjam tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut, setelah mengajukan permohonan kepada Swamitra dan diproses oleh Swamitra melalui proses yang panjang maka akan diteruskan pada tahap penanda tangan kontrak, apabila perjanjian telah mendapatkan kata sepakat dari para pihak maka barulah bisa di lakukan pencairan pada pinjaman tersebut. Pelaksanaanya tersebut telah terlaksana, hal ini dapat dilihat dengan adanya kegiatan pelaksanaan antara Koperasi Swamitara Air Tiris sebagai pemberi modal terhadap nasabah dan nasabah sebagai penerima dana. Pelaksanaan perjanjian ini dilakukan untuk membantu nasabah yang kesulitan dalam menembangkan dan memperlancar usahanya maka Koperasi Swamitra akan memberikan batuan berupa modal untuk usaha tentunya dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Swamitra.

2. Dalam pelaksanaan perjanjian antara nasabah dan Koperasi Swamitra Air Tiris dengan jaminan BPKB motor, banyak sekali kendala. Dimana adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, salah satu diantaranya adalah menggunakan modal yang dipinjamkan oleh Koperasi Swamitra tidak digunakan untuk usaha melainkan untuk keperluan sehari-hari dan lain sebagainya, sehingga hal tersebut membuat usahanya kurang lancar dan bahkan menjadi macet, nasabah yang seperti ini dapat di kategorikan peminjam yang bermasalah.
3. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan Koperasi Swamitra adalah dengan cara memberikan peringatan kepada nasabah tersebut dan mengutamakan penyelesaian diluar Pengadilan dengan kata lain penyelesaian berdasarkan kekeluargaan. Maksudnya adalah dengan menyelesaikan secara bersama-sama maka akan tercapai apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Apabila cara kekeluargaan tidak tercapai maka barulah penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri.

B. Saran

1. Kesalahan memang bukan sepenuhnya datang dari nasabah tapi juga dari swamitra itu sendiri, oleh karena itu Swamitra harus lebih intensif pengawasannya terhadap nasabah dan tekankan bahwa peminjaman dana tersebut tujuannya adalah untuk membantunya dalam mengembangkan usaha, seta tercapainya tujuan dari Swamitra itu sendiri.
2. Buat nasabah, harusnya lebih memahami bahwa dana yang diberikan adalah untuk usaha bukan untuk yang lain, apabila modal atau dana tersebut

digunakan untuk keperluan lain maka hal itu tentunya akan berakibat pada pengembalian pinjaman dan pelaksanaan dari perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik serta hal tersebut dapat dikatakan wanprestasi.

3. Harusnya sesekali penyelesaian terhadap nasabah yang wanprestasi diselesaikan pada Pengadilan Negeri apabila jalan musyawarah tidak menemukan titik terang, sehingga hal tersebut memberikan efek jerah pada nasabah dan tentunya jadi gambaran buat nasabah yang lainnya agar tidak melakukan wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Prespektif Sekretaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009
- H. Malayu SP. Hsibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005
- H. Moh. Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial, (Konsep, Teknik & Kasus)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999
- H. Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluara KUH Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pres, 2003
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- M. Bahasan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008
- Moh. Firdaus & Agus Edhi Susanto, *Perkoprasian Sejarah, Teori & Praktek*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004
- Natara Andria & Nurbekti Satrio, *Solusi Cerdas Mengatasi Hutang dan Kredit*, Jakarta: Penebar Plus, 2008
- Nugroho Widi, *Informasi Kredit Usaha Kecil*, Jakarta: Pustaka Binamana Pressindo, 1197
- Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Rahmad Firdaus & Maya Arianti, *Manajemen Perbankan Umum*, Bandung: Alfabeta, 2011
- R.T Sutantya Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005
- Sutan Remy Sajahdeini, *Kebebasan Berkontarak*, Jakarta: PT Pustaka Utama, 2009

Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2010

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1992

Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Arga Printing, 2007

Thomas Suyatno dan Kawan-kawan, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta: STIE Perbanas & Garmedia Pustaka utama, 1995.

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Jakarta, Sinar Grafika: 2005

Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012, Jakarta, Pemerintah Provinsi Riau: 2012